

**PENJUALAN MAKANAN RINGAN TANPA KEMASAN BERSEGEL
DALAM TINJAUAN HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN
HUKUM ISLAM**

(Studi di Toko Damarian Bandar Lampung)

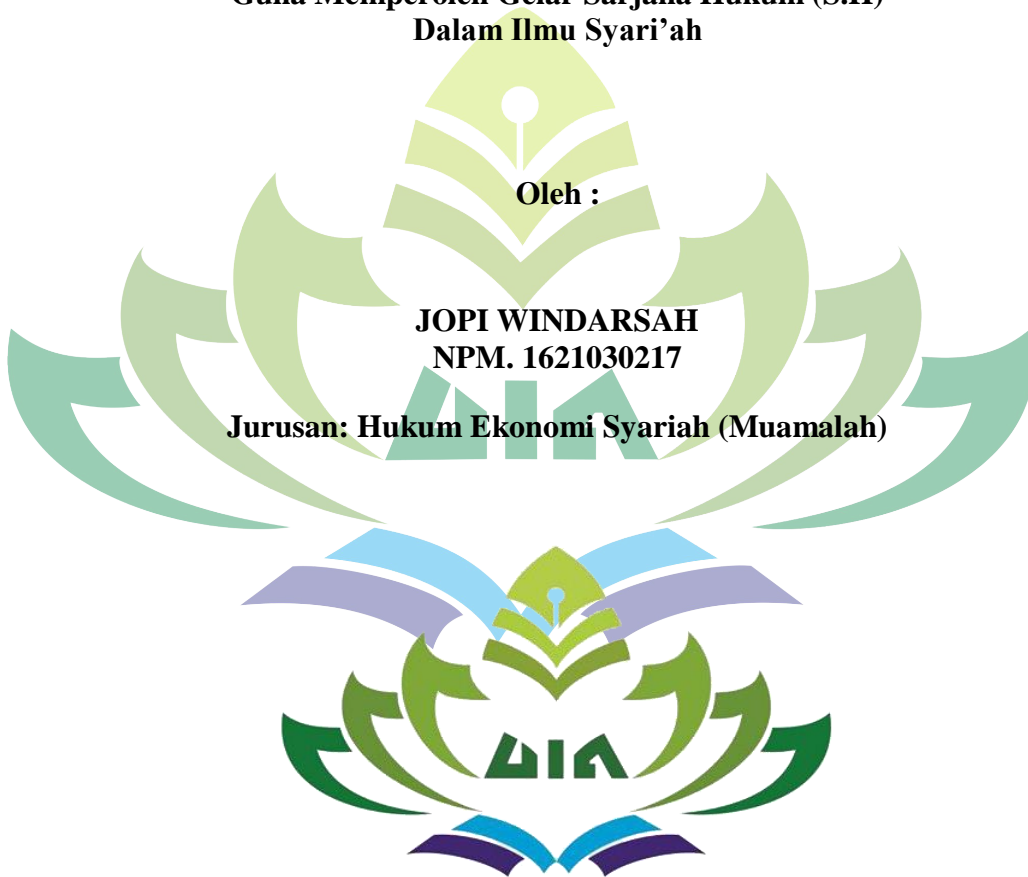
Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Ilmu Syari'ah**

Oleh :

**JOPI WINDARSAH
NPM. 1621030217**

Jurusan: Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)



**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1442 H/ 2020 M**

ABSTRAK

Mengonsumsi makanan yang tidak menggunakan kemasan permanen dapat berbahaya bagi konsumen, bahaya yang dapat ditimbulkan dari mengonsumsi makanan yang tidak menggunakan kemasan permanen yaitu dapat mengakibatkan mudah tercemarnya makanan tersebut sehingga mengakibatkan makanan tersebut kurang steril. Maka alangkah baiknya jika memakan makanan yang menggunakan kemasan yang permanen, hal ini merupakan perintah dari Allah SWT kepada kita manusia agar makan dan minum yang terjamin keseterilannya bagi tubuh. Halal dari aspek hukumnya dan baik dilihat dari keadaannya. Pada penelitian ini di toko Damarian Bandar Lampung, terdapat penjualan makanan ringan tanpa kemasan bersegel sehingga kurang terjaminnya makanan ringan tersebut untuk di konsumsi para konsumen. Penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut pertama, bagaimana menurut pandangan hukum perlindungan konsumen dan hukum Islam tentang penjualan makanan ringan tanpa kemasan bersegel di toko Damarian Bandar Lampung?. Kedua, bagaimana perbandingan hukum perlindungan konsumen dan hukum Islam dalam penjualan makanan ringan tanpa kemasan bersegel di toko damarian bandar Lampung?. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pandangan hukum perlindungan konsumen dan hukum Islam tentang penjualan makanan ringan tanpa kemasan bersegel di toko Damarian Bandar Lampung, serta untuk memahami perbandingan hukum perlindungan konsumen dan hukum Islam dalam penjualan makanan ringan tanpa kemasan bersegel di toko Damarian Bandar Lampung. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, dengan jenis penelitian lapangan (*field research*). Pada penelitian ini penulis mengambil 17 (tujuh belas) orang sebagai informan dengan penjelasan sebagai berikut, 2 orang pegawai Toko Damarian, dan 1 (satu) orang manager Toko Damarian, serta 14 (empat belas) orang konsumen. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Setelah data terkumpul, penulis melakukan pengolahan data secara *Editing*, *Klasifikasi*, *Interprestasi*, dan *Sistematic*, serta dianalisa menggunakan pemikiran deduktif dan induktif. Berdasarkan metode penelitian yang digunakan di atas, dapat disimpulkan bahwa penjualan makanan ringan tanpa kemasan bersegel sudah memenuhi beberapa hak hak konsumen namun masih ada beberapa hak yang belum terpenuhi salah satu hak yang tidak dipenuhi penjual kepada pembeli tersebut adalah hak atas keamanan dan keselamatan dalam mengonsumsi barang. sebagaimana yang tertuang dalam pasal 4 huruf a uupk. dikarnakan sangat penting bagi pembeli untuk mendapatkan jaminan keamanan dan keselamatan terkait barang dari pihak penjual, karena dari jaminan keamanan tersebut akan mempengaruhi pembeli dalam menentukan barang mana yang akan mereka pilih untuk dibeli. Dalam hal ini maka penjualan makanan ringan tanpa kemasan bersegel di toko Damarian Bandar Lampung masih belum sepenuhnya memenuhi hak hak konsumen. Sedangkan dalam hukum islam bahwa penjualan makanan ringan tanpa kemasan bersegel di toko Damarian Bandar Lampung, sudah memenuhi beberapa syarat sahnya jual beli dalam hukum Islam, namun masih ada beberapa syarat jual beli dalam hukum Islam yang belum sepenuhnya terpenuhi.



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Tlp. (0721) 703289

PERSETUJUAN

Tim pembimbing, setelah mengoreksi dan memberikan masukan-masukan secukupnya, maka skripsi saudara :

Nama : Jopi Windarsah

NPM : 1621030217

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

**Judul : PENJUALAN MAKANAN RINGAN TANPA
KEMASAN BERSEGEL DALAM TINJAUAN
HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN
HUKUM ISLAM (Studi di Toko Damarian Bandar
Lampung)**

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam sidang
Munaqosyah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Iskandar Syukur, M.A.

Helma Maruliza, S.E.I., M.E.Sy.

NIP. 196603301992031002

NIP. -

Mengetahui

Ketua Jurusan Muamalah

Khoiruddin, M.S.I

NIP. 197807252009121002



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Tlp. (0721) 703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **PENJUALAN MAKANAN RINGAN TANPA KEMASAN BERSEGEL DALAM TINJAUAN HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN HUKUM ISLAM** (Studi di Toko Damarian Bandar Lampung) disusun oleh: **Jopi Windarsah, NPM : 1621030217**, Program Studi **Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)**, Telah di Ujikan dalam sidang Munaqasyah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan pada Hari/Tanggal : 27 November 2020

TIM PENGUJI

Ketua : Marwin, S.H., M.H

Sekretaris : Muslim, M.H.I

Penguji Utama : Dr. Jayusman, M.Ag

Penguji I : Dr. Iskandar Syukur, M.A

Penguji II : Helma Maraliza, S.E.I., M.E.Sy.

(.....)
(.....)
(.....)
(.....)
(.....)



**Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah**

Dr. Khairuddin, M.H.
NIP. 196210221993031002

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (Q.S. An-nisaa' (4) : 29).



PERSEMBAHAN

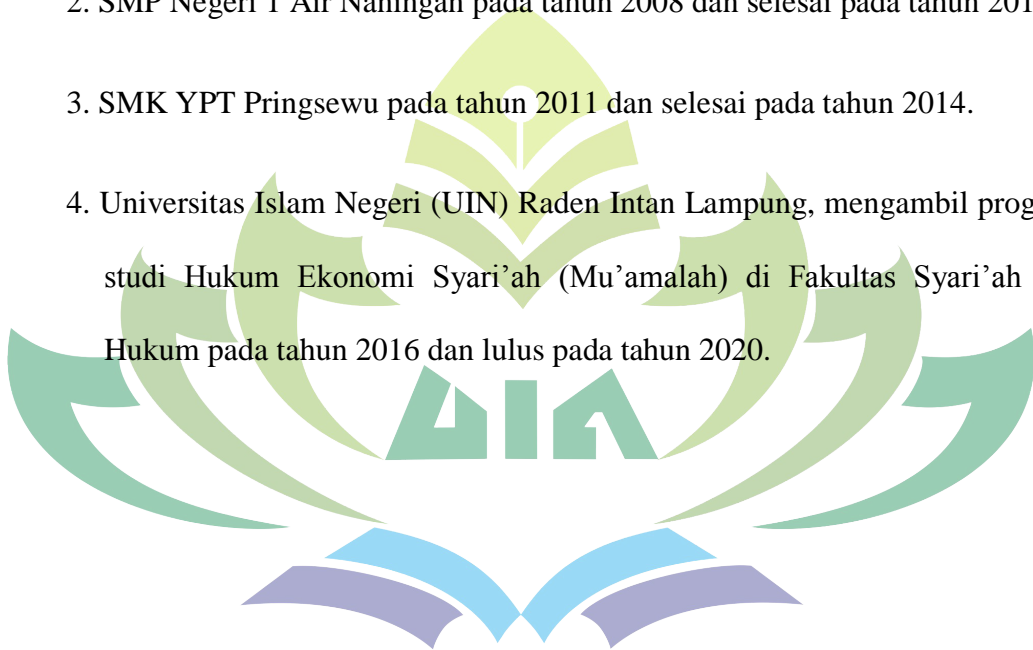
Skripsi sederhana ini dipersembahkan dan didedikasikan sebagai bentuk ungkapan rasa syukur, tanda cinta dan kasih sayang, serta hormat yang tak terhingga kepada:

1. Untuk kedua orangtua ku Ayah tercinta Ajid dan Mama tercinta Ismitati, atas segala jasa, pengorbanan, do'a, motivasi, dukungan moril dan materil serta curahan kasih sayang yang tak terhingga, sehingga dengan upayaku bisa membuat ayah dan mama bangga.
2. Untuk Adikku tercinta Lola Adetia, dan Daniel kurniawan yang sudah memberi dorongan semangat, do'a, dan dukungan moril maupun materil, serta kasih sayang yang tak terhingga.
3. Untuk seluruh keluarga besarku baik yang ada di Tanggamus, maupun di luar Tanggamus atas segala do'a dan kasih sayang, dukungan dan motivasi atas keberhasilanku.
4. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

RIWAYAT HIDUP

Jopi windarsah, lahir di Tanggamus, Air naningan pada tanggal 02 Januari 1996, anak ke pertama dari tiga bersaudara buah cinta kasih dari pasangan Bapak Ajid dan Ibu Ismitati. Adapun pendidikan yang telah ditempuh ialah:

1. SD Negeri 1 Kedung Palungpung pada tahun 2002 dan selesai tahun 2008.
2. SMP Negeri 1 Air Naningan pada tahun 2008 dan selesai pada tahun 2011.
3. SMK YPT Pringsewu pada tahun 2011 dan selesai pada tahun 2014.
4. Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung, mengambil program studi Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah) di Fakultas Syari'ah dan Hukum pada tahun 2016 dan lulus pada tahun 2020.



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur kehadiran Allah swt yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayah-Nya, sehingga skripsi dengan judul “Penjualan Makanan Ringan Tanpa Kemasan Bersegel Dalam Tinjauan Hukum Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam (Studi di Toko Damarian Korpri, Bandar Lampung)” dapat terselesaikan. Shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad saw, keluarga, para sahabat dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman.

Skripsi ini ditulis dan diselesaikan sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program Strata Satu (S1) Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Ilmu Syari'ah.

Atas semua pihak dalam proses penyelesaian skripsi ini, tak lupa penulis haturkan terimakasih sebesar-besarnya dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang terlihat dalam penulisan skripsi ini. Secara khusus penulis ucapkan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. H. Moh Mukri, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan untuk menimba ilmu di kampus tercinta ini.

2. Dr. H. Khairuddin Tahmid, M.H. selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan untuk menimba ilmu di kampus tercinta ini.
3. Khoiruddin, M.S.I. selaku Ketua Jurusan Muamalah dan Juhrotul Khulwah, M.S.I. selaku Sekretaris Jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung yang senantiasa membantu dan memberikan bimbingan serta arahan terhadap kesulitan-kesulitan mahasiswanya.
4. Dr. Iskandar Syukur, M.A. selaku pembimbing I dan Helma Maraliza, S.E.I., M.E.Sy. selaku pembimbing II yang selalu memberikan masukan, saran, serta meluangkan waktunya untuk senantiasa memberikan bimbingan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Bapak/Ibu Dosen dan Staf Karyawan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung yang telah banyak membantu selama masa perkuliahan.
6. Kepala beserta staf perpustakaan pusat dan perpustakaan syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung yang telah memberikan kemudahan dalam menyediakan referensi yang dibutuhkan.
7. Guru-guruku tercinta dari Sekolah Dasar sampai Sekolah Menengah Atas yang telah mengajarkanku banyak hal sehingga dapat membaca, menulis dan mengetahui banyak hal hingga dapat masuk di perguruan tinggi ini.
8. Teman-teman seperjuangan Muamalah angkatan 2016, khususnya para sahabat dan keluarga besar Muamalah C angkatan 2016, yang telah membantu

dan memotivasi dalam menyelesaikan skripsi ini, serta memberikan warna, canda tawa dan berbagai pengalaman selama empat tahun masa perkuliahan.

9. Sahabat-sahabat WJS ku, Sahabat-sahabat Kosan Sohari, dan Sahabat-sahabat Markas Mami, yang telah memotivasi, mendampingi, memberikan semangat, dukungan, canda tawa, suka duka, serta doa dalam proses penyelesaian skripsi ini.

10. Rekan-rekan KKN Kelompok 147, Desa Pulau Panggung, Kabupaten Tanggamus angkatan 2016 yang telah memberikan banyak pengalaman yang takkan terlupakan.

11. Rekan-rekan PPS kelompok 40 , yang luar biasa menginspirasi untuk segera terselesaikannya skripsi ini dan segera dimunaqasahkan.

12. Almamater tercintaku Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung. Semoga bantuan serta segalanya yang telah diberikan oleh semua pihak mendapatkan balasan yang berlipat serta pahala dari yang maha kuasa Allah swt.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Bandar lampung, 13 Juni 2020

Penulis

Jopi Windarsah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
PERSETUJUAN.....	iv
PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul.....	1
B. Alasan Memilih Judul.....	3
C. Latar Belakang Masalah	4
D. Fokus Penelitian	6
E. Rumusan Masalah.....	6
F. Tujuan Penelitian.....	7
G. Signifikansi Penelitian.....	7
H. Metode Penelitian.....	7

BAB II KAJIAN TEORI

A. Kajian Teori	
1. Perlindungan Konsumen	
a. Pengertian Perlindungan Konsumen	13
b. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen	16
c. Landasan Hukum Tentang Perlindungan Konsumen.....	19
d. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha	20
e. Hak dan Kewajiban Konsumen.....	24
2. Perlindungan Konsumen Menurut Hukum Islam	
a. Sejarah Perlindungan Konsumen dalam Hukum Islam	36
b. Dasar Hukum Perlindungan Konsumen dalam Hukum Islam.....	42
c. Tujuan dan Hak Perlindungan Konsumen dalam Hukum Islam.....	43
d. Tanggung Jawab Perlindungan Konsumen dalam Islam	46
B. Tinjauan Pustaka.....	49

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	54
1. Sejarah Berdirinya Damarian	54
2. Visi, Misi, dan Filosofi Damarian	55
3. Strategi Pemasaran Toko damarian	57
4. Struktur Organisasi dan Pembagian Kerja di Toko Damarian	59

B. Praktik Penjualan Makanan Ringan Tanpa Kemasan Bersegel Pada Toko Damarian Kota Bandar Lampung.....	59
C. Pandangan Konsumen Mengenai Penjualan Makanan Ringan	62

BAB IV ANALISA PENELITIAN

A. Pandangan Hukum Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam Tentang Penjualan Makanan Ringan Tanpa Kemasan Bersegel di Toko Damarian Bandar Lampung.....	70
B. Perbandingan Hukum Perlindungan Konsumen Dengan Hukum Islam ...	73

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	79
B. Rekomendasi.....	81

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN-LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal untuk memudahkan dan menghindari kesalahpahaman dalam memahami pengertian atau maksud dari skripsi ini dan sebelum melangkah kepada pembahasan selanjutnya, terlebih dahulu akan dijelaskan tentang arti atau definisi dari istilah-istilah yang terkandung didalam judul, adapun judul skripsi ini adalah Penjualan Makanan Ringan Tanpa Kemasan Bersegel Dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Perlindungan Konsumen (Studi Kasus di Toko Damarian Kota Bandar Lampung). Adapun pengertian beberapa istilah pada skripsi ini sebagai berikut:

1. Penjualan

Penjualan adalah pengeluaran yang langsung berhubungan usaha pemasaran produk.¹

2. Makanan Ringan

Makanan ringan adalah makanan yang sifatnya mengenyangkan sementara waktu dan bukan merupakan menu utama.²

3. Kemasan Bersegel

Kemasan Bersegel adalah desain kreatif yang mengaitkan bentuk, struktur, material, warna, citra, tipografi dan elemen-elemen desain dengan

¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 457.

² *Ibid.* h. 899.

informasi produk dan kemasan yang tersegel permanen agar produk dapat dipasarkan.

4. Tinjauan

Tinjauan yaitu hasil meninjau.³ Pandangan, pendapat sesudah menyelidiki, mempelajari dan sebagainya.

5. Hukum Islam

Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk umat yang beragama Islam. Dalam pengertian lain, hukum Islam adalah sekumpulan ketetapan hukum kemaslahatan mengenai perbuatan hamba yang terkandung dalam sumber Al-Qur'an dan Sunnah baik ketetapan yang secara langsung (*eksplisit*) ataupun tidak langsung (*implisit*).⁴

6. Hukum

Hukum adalah sebuah peraturan atau ketetapan ketentuan yang tertulis ataupun yang tidak tertulis untuk mengatur kehidupan masyarakat dan menyediakan sanksi untuk orang yang melanggar hukum.⁵

7. Perlindungan konsumen

Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.⁶

³ *Ibid*, h. 1470.

⁴ Muhammad Syah, *Filsaat Hukum Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), h. 17.

⁵ Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1986), h. 38.

⁶ Miru Ahmadi, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), h. 4.

Berdasarkan beberapa istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini dapat disimpulkan sebagai upaya mengkaji bagaimana Penjualan Makanan Ringan Tanpa Kemasan Bersegel Dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Perlindungan Konsumen (Studi Kasus di Toko Damarian Kota Bandar Lampung).

B. Alasan Memilih Judul

Adapun alasan-alasan penulis tertarik dalam memilih dan menentukan judul tersebut adalah:

1. Alasan Objektif

Alasan objektifnya adalah dengan melihat munculnya masalah dalam penjualan makanan tanpa kemasan bersegel ini sudah umum ada di dalam supermarket maupun di dalam minimarket, seluruh konsumen dapat dengan mudah membeli makanan tersebut tanpa mengetahui secara langsung seperti apa kemasan makanan tersebut dan apakah makanan yang ada di dalam kemasan tersebut aman untuk di konsumsi. Sehingga terdapat beberapa keluhan konsumen makanan tersebut tidak bisa di konsumsi dengan baik. Masalah tersebut penting untuk diteliti. Karena semakin banyak konsumen yang saat ini lebih memilih untuk membeli makanan ringan yang menggunakan kemasan unik dan bentuknya bagus, maka penjual makanan tersebut tidak tau secara detail tentang hukum perlindungan konsumen dan bagaimana hukum yang berlaku dalam Islam jika penjualan makanan tersebut di praktikkan.

2. Alasan Subjektif

Ditinjau dari aspek pembahasan judul penelitian ini sesuai dengan disiplin ilmu yang penulis pelajari di bidang Muamalah Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung serta didukung oleh tersedianya data-data literatur yang dibutuhkan dalam penyusunan skripsi kali ini.

C. Latar Belakang Masalah

Jual beli tidak dapat dihindari dari kehidupan manusia sehari-hari memenuhi kebutuhan hidupnya. Jual beli ialah suatu perjanjian dimana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu benda yang telah dipejanjikan. Sedangkan menurut Wahbah Al-Zuhaily, jual beli adalah perdagangan dalam istilah fiqh disebut *al-bay* yang menurut etimologi berarti menjual atau mengganti. Sedangkan secara bahasa yaitu menukar sesuatu dengan sesuatu.⁷ Hal ini merupakan salah satu yang sering dilakukan oleh masyarakat yaitu penjualan makanan tanpa kemasan bersegel.⁸

Islam juga mengajarkan untuk mengkonsumsi makanan yang halal dan baik sebagai mana dalam Al-Quran yang berbunyi:

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِء مُؤْمِنُونَ ﴿٨٨﴾

Artinya: “Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezezikkan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya”. (QS.Al-Maidah:88).

⁷ Wahbah al-Zuhaily, *Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh Terjemah Abdul Hayyie Al-Kattani*, Jilid 5 (Jakarta: Gema Insani, 2010), h. 304.

⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h.97.

Menurut penjelasan dari ayat tersebut diperintahkan supaya mengkonsumsi makanan yang halal dan baik (bergizi). Oleh karena itu, mengkonsumsi makanan yang tidak menggunakan kemasan bersegel berbahaya bagi konsumen tersebut. Dengan bahayanya akibat yang ditimbulkan dari mengkonsumsi makanan yang tidak menggunakan kemasan bersegel yaitu dapat mengakibatkan mudah tercemarnya makanan tersebut sehingga mengakibatkan makanan tersebut kurang steril. Maka hukumnya alangkah baiknya jika memakan makanan yang menggunakan kemasan yang permanen, ini merupakan perintah dari Allah SWT kepada manusia agar makan dan minum yang terjamin keseterilannya bagi tubuh. Halal dari aspek hukumnya dan baik dilihat dari keadaannya. Maka makanlah olehmu makanan yang dibolehkan oleh agama dan mengandung gizi yang baik. Dalam penelitian ini di Toko Damarian Bandar Lampung terdapat penjualan makanan ringan tanpa kemasan bersegel sehingga kurang terjaminnya makanan ringan tersebut untuk dikonsumsi para konsumen.

Berdasarkan keterangan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Penjualan Makanan Ringan Tanpa Kemasan Bersegel Dalam Tinjauan Hukum Perlindungan Konsumen Dan Hukum Islam” (Studi pada Toko Damarian Kota Bandar Lampung).sehingga penyusun merasa bahwa persoalan ini perlu dikaji secara mendalam, agar dalam realitanya dapat dipraktikkan dengan berpegang pada aturan-aturan hukum perlindungan konsumen dan hukum Islam, serta sesuai dengan prinsip

syari'ah dan tidak ada keraguan bagi umat Islam khususnya terhadap penjualan makanan ringan tanpa kemasan bersegel.

D. Fokus Penelitian

Pada penelitian ini penulis memfokuskan pada masalah yang akan penulis teliti lebih dalam terlebih dahulu, agar tidak terjadi perluasan masalah yang tidak diinginkan sehingga menjadi tidak sesuai dengan tujuan penelitian ini. Maka penelitian ini penulis fokuskan untuk meneliti:

1. Pandangan Hukum Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam tentang Penjualan Makanan Ringan Tanpa Kemasan Bersegel di Toko Damarian Bandar Lampung.
2. Pandangan Hukum Islam dalam Perbandingan Hukum Perlindungan Konsumen dengan Hukum Islam Bersegel Di Toko Damarian Bandar Lampung.

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang permasalahan di atas, adapun permasalahan yang akan diteliti dalam skripsi ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Pandangan Hukum Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam tentang Penjualan Makanan Ringan Tanpa Kemasan Bersegel di Toko Damarian Bandar Lampung?
2. Bagaimana Perbandingan Hukum Perlindungan Konsumen dengan Hukum Islam?

F. Tujuan Penelitian

Setelah penulis identifikasi terhadap masalah-masalah yang ada, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Pandangan Hukum Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam tentang Penjualan Makanan Ringan Tanpa Kemasan Bersegel di Toko Damarian Bandar Lampung.
2. Untuk Mengetahui Perbandingan Hukum Perlindungan Konsumen dengan Hukum Islam.

G. Signifikansi Penelitian

1. Secara teoritis berguna sebagai upaya menambah wawasan ilmu pengetahuan bagi penulis dan memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang ilmu pengetahuan khususnya dalam ketentuan penjualan makanan ringan tanpa kemasan bersegel.
2. Secara praktis penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar S.H. pada Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah *field research*, yaitu suatu penelitian yang bertujuan mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan dengan

berkunjung langsung ketempat yang dijadikan objek penelitian.⁹ Penelitian lapangan dimaksudkan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan dan posisi saat ini, serta interaksi lingkungan unit sosial tertentu yang bersifat apa adanya.¹⁰ Adapun yang menjadi obyek penelitian di sini adalah penjualan makanan ringan tanpa kemasan bersegel di Damarian Bandar Lampung.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Penelitian deskriptif analisis menitikberatkan pada observasi dan *setting* alamiah. Peneliti bertindak sebagai pengamat yang hanya membuat kategori perilaku, mengamati gejala dan mencatatnya dengan tidak memanipulasi *variable* kemudian dilanjutkan dengan analisis berdasarkan hukum Islam.¹¹

3. Sumber Data Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, maka sumber data yang diperlukan di bagi menjadi dua macam, yaitu:

⁹ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial* (Bandung: Mundur Maju, 1996), h. 81.

¹⁰ Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif* (Bandung: Pustaka Setia, 2002), h. 54-55.

¹¹ *Ibid.* h. 56.

a. Data Primer

Data primer, yaitu data-data yang diperoleh dari sumber pertama yakni langsung dari tempat penelitian.¹² Yang diperoleh dari lapangan dengan cara wawancara yaitu langsung bertemu para pihak yang melakukan penjualan makanan ringan tanpa kemasan bersegel. Sumber data primer ini diperoleh dari data-data yang tepat dari Toko Damarian Bandar Lampung sebagai tempat penelitian dan pelaksanaannya penelitian tersebut.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder umumnya berupa bukti, buku-buku, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.¹³

4. Partisipan dan Tempat Penelitian

Suatu penelitian yang bersifat kualitatif pasti membutuhkan seseorang untuk menjadi informan penelitian yang mana dalam penelitian ini, penulis mengambil atau mencari 17 (tujuh belas) orang sebagai informan dengan penjelasan sebagai berikut, 14 (empat belas) orang sebagai konsumen, 2 (dua) orang sebagai pegawai toko, dan 1 (satu) orang sebagai pemilik toko Damarian. Dengan demikian, penulis berharap mendapatkan informasi secara rinci dan sesuai dengan rumusan masalah.

¹² Amirudin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode dan Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h. 30.

¹³ *Ibid.* h. 31.

Sedangkan untuk tempat penelitian dan para informan dalam penelitian ini yang akan dilibatkan adalah penjual atau pemilik toko dan juga para konsumen yang membeli makanan ringan pada toko Damarian.

5. Metode Pengumpulan Data

a. Observasi (Pengamatan)

Observasi adalah suatu teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang diselidiki.¹⁴ Dalam hal ini penulis akan mengobservasi penjualan makanan ringan tanpa kemasan bersegel di Toko Damarian Bandar Lampung. Penelitian ini bertujuan mengetahui fenomena yang terjadi terkait dengan masalah yang diteliti.

b. Wawancara (*Interview*)

Interview atau wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu, ini merupakan proses tanya jawab lisan (*verbal*), dimana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik.¹⁵ Untuk memperoleh data, dilakukan wawancara dengan pemilik toko, karyawan, dan konsumen di Toko Damarian Bandar Lampung.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau *variable* yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah,

¹⁴ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2004), h. 151.

¹⁵ Susiadi, *Metodologi Penelitian Hukum* (Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbit LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2015), h. 4.

notulen rapat, dan sebagainya.¹⁶ Adapun yang menjadi buku utama penulis dalam mengumpulkan data adalah buku-buku Fiqh serta dokumen-dokumen yang penulis peroleh di lapangan.

6. Pengolahan Data

Pengolahan data dapat berarti menimbang, menyaring, mengatur, mengklarifikasikan. Dalam menimbang dan menyaring data, benar-benar memilih secara hati-hati data yang relevan dan tepat serta berkaitan dengan masalah yang diteliti sementara mengatur dan mengklarifikasi dilakukan dengan menggolongkan, menyusun menurut aturan tertentu.¹⁷ Melalui pengolahan data-data yang telah dikumpulkan, maka penulis menggunakan tahapan-tahapan sebagai berikut:

a. *Editing* Data

Editting adalah pemeriksaan kembali data yang telah dikumpulkan dengan menilai apakah data yang telah dikumpulkan tersebut cukup baik atau relevan untuk diproses atau diolah lebih lanjut.¹⁸

b. *Klasifikasi* Data

Klasifikasi adalah penggolongan data-data sesuai dengan jenis dan penggolongannya setelah diadakannya pengecekan.¹⁹

c. *Interprestasi* Data

Interprestasi yaitu memberikan penafsiran terhadap hasil untuk menganalisis dan menarik kesimpulan.²⁰

¹⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), h. 188.

¹⁷ Moh Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h. 75.

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ *Ibid.* h. 76.

d. *Sistemating Data*

Sistemating yaitu melakukan pengecekan terhadap data-data dan bahan-bahan yang telah diperoleh secara sistematis, terarah dan berurutan sesuai dengan klasifikasi data yang diperoleh.²¹

7. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan kajian penelitian dengan menggunakan metode kualitatif. Maksudnya ialah bahwa analisis ini bertujuan untuk mengetahui tentang bagaimana penjualan makanan ringan tanpa kemasan bersegel dalam tinjauan hukum perlindungan konsumen dan hukum Islam.²²

Sedangkan metode berfikir skripsi menggunakan metode induktif, yaitu metode yang mempelajari suatu gejala yang khusus untuk mendapatkan kaidah-kaidah yang diselidiki. Metode ini digunakan dalam membuat kesimpulan tentang berbagai hal yang berkenaan dengan permasalahan yang ada. Hasil analisisnya dituangkan di bab-bab yang telah dirumuskan dalam sistematika pembahasan dalam penelitian ini. Penelitian ini termasuk penelitian komparatif yaitu jenis penelitian yang digunakan untuk membandingkan antara dua kelompok atau lebih dari suatu variabel tertentu.²³

²⁰ *Ibid.* h. 77.

²¹ *Ibid.* 75-78.

²² Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2004),. h. 36.

²³ *Ibid.* h. 37

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kajian Teori

1. Teori Perlindungan Konsumen

a. Pengertian Perlindungan Konsumen

Perdagangan secara umum mengenal 2 pihak. Yaitu pembeli atau konsumen dan penjual atau produsen. Produsen adalah penyedia barang sedangkan konsumen adalah pemakai barang. Istilah konsumen berasal dari kata *consumer* (Inggris-Amerika) atau *consument/konsument* (Belanda).²⁴ Secara harfiah arti kata konsumen adalah (lawan dari produsen) setiap orang yang menggunakan barang. Konsumen pada umumnya diartikan sebagai pemakai terakhir dari produk yang diserahkan kepada mereka oleh pengusaha, yaitu setiap orang yang mendapatkan barang untuk dipakai dan tidak untuk diperdagangkan atau diperjual belikan lagi. Jika ditelaah maka produsen berada pada posisi yang lebih kuat dari pada konsumen, padahal dalam perdagangan itu haruslah adil atau kedua pihak berada di posisi yang sejajar. Hal tersebut mendukung terbentuknya Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.²⁵

Di Indonesia, untuk menjamin dan melindungi kepentingan konsumen atas produk barang atau jasa yang dibeli, pada tanggal 20 April 1999 Pemerintah Republik Indonesia memberlakukan

²⁴ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 2

²⁵ *Ibid.* h. 3.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821. UUPK ini berlaku efektif pada tanggal 20 April 2000,¹⁴ yang merupakan awal pengakuan perlindungan konsumen secara legitimasi formal yang menjadi sarana dan kekuatan hukum bagi konsumen dan tanggung jawab pelaku usaha sebagai penyedia pembuat produk bermutu. UUPK ini memuat aturan-aturan yang dijadikan sebagai payung hukum bagi peraturan perundang-undangan lain yang menyangkut konsumen, dan sekaligus mengintegrasikannya sehingga dapat memperkuat penegakan hukum di bidang perlindungan konsumen. Perlu diperhatikan, bahwa UUPK ini bukan merupakan awal dan akhir dari hukum yang mengatur tentang perlindungan konsumen, tetapi terbuka kemungkinan terbentuknya undang-undang baru yang pada dasarnya memuat ketentuan-ketentuan yang melindungi konsumen.

Pengertian perlindungan konsumen terdapat dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UUPK), yaitu segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.²⁶ Rumusan pengertian perlindungan konsumen yang terdapat dalam Pasal 1 angka 1 UUPK tersebut cukup memadai. Kalimat yang menyatakan “segala upaya yang menjamin adanya

²⁶ *Ibid.* h. 5

kepastian hukum”, diharapkan sebagai benteng untuk meniadakan tindakan sewenang-wenang yang merugikan pelaku usaha hanya demi untuk kepentingan perlindungan konsumen²⁷. Kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen itu antara lain adalah dengan meningkatkan harkat dan martabat konsumen serta membuka akses informasi tentang barang dan/ atau jasa baginya, dan menumbuhkan sikap pelaku usaha yang jujur dan bertanggung jawab.²⁸

Tujuan yang ingin dicapai dalam perlindungan konsumen umumnya dapat dibagi dalam tiga bagian utama, yaitu:

- 1) Memberdayakan konsumen dalam memilih, menentukan barang dan/atau jasa kebutuhannya, dan menuntut hak-haknya;
- 2) Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang memuat unsur-unsur kepastian hukum, keterbukaan informasi, dan akses untuk mendapatkan informasi itu;
- 3) Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap jujur dan bertanggung jawab.²⁹

Pada hakikatnya, perlindungan konsumen menyiratkan keberpihakan kepada kepentingan-kepentingan (hukum) konsumen. Adapun kepentingan konsumen menurut Resolusi perserikatan bangsa-bangsa Nomor 39/284 tentang *Guidelines for Consumer Protection*, sebagai berikut:

²⁷ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 1.

²⁸ Adrian Sutedi, *Tanggung Jawab Produk Dalam Perlindungan Konsumen*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2008), h. 9.

²⁹ *Ibid.*

- 1) Perlindungan konsumen dari bahaya-bahaya terhadap kesehatan dan keamanannya;
- 2) Promosi dan perlindungan kepentingan sosial ekonomi konsumen;
- 3) Tersedianya informasi yang memadai bagi konsumen untuk memberikan kemampuan mereka melakukan pilihan yang tepat sesuai kehendak dan kebutuhan pribadi;
- 4) Pendidikan konsumen;
- 5) Tersedianya upaya ganti rugi yang efektif;
- 6) Kebebasan untuk membentuk organisasi konsumen atau organisasi lainnya yang relevan dan memberikan kesempatan pada organisasi tersebut untuk menyuarakan pendapatnya dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan mereka³⁰.

b. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen

Pasal 2 UUPK, asas perlindungan konsumen adalah: perlindungan konsumen berdasarkan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum.³¹

Perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan 5 (lima) asas yang relevan dalam pembangunan nasional, yaitu:

- 1) Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen harus

³⁰ Celina Tri Siwi Kristianti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 155.

³¹ *Ibid.* h. 157.

- memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan;
- 2) Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil;
 - 3) Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil dan spiritual;
 - 4) Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan;
 - 5) Asas kepastian hukum dimaksudkan agar pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.

Substansi Pasal 2 UUPK demikian pula penjelasannya, tampak bahwa perumusannya mengacu pada filosofi pembangunan nasional yaitu pembangunan manusia Indonesia seutuhnya yang berlandaskan pada falsafah bangsa negara Republik Indonesia³². Kelima asas yang

³² Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 26.

disebutkan dalam pasal tersebut, bila diperhatikan substansinya, dapat dibagi menjadi 3 (tiga) bagian asas yaitu:

- 1) Asas kemanfaatan yang di dalamnya meliputi asas keamanan keselamatan konsumen;
- 2) Asas keadilan yang di dalamnya meliputi asas keseimbangan; dan
- 3) Asas kepastian hukum.³³

Asas-asas Hukum Perlindungan Konsumen yang dikelompokkan dalam 3 (tiga) kelompok diatas yaitu asas keadilan, asas kemanfaatan, dan kepastian hukum. Dalam hukum ekonomi keadilan disejajarkan dengan asas keseimbangan, kemanfaatan disejajarkan dengan asas maksimalisasi, dan kepastian hukum disejajarkan dengan asas efisiensi. Asas kepastian hukum yang disejajarkan dengan asas efisien karena menurut Himawan bahwa: “Hukum yang berwibawa adalah hukum yang efisien, di bawah naungan mana seseorang dapat melaksanakan hak-haknya tanpa ketakutan dan melaksanakan kewajibannya tanpa penyimpangan”.³⁴ Tujuan perlindungan konsumen juga diatur dalam Pasal 3 UUPK, yaitu:

- 1) Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- 2) Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa;

³³ Ahmadi Miru, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 33.

³⁴ *Ibid*, h. 33.

- 3) Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
- 4) Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsure kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
- 5) Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan Konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
- 6) Meningkatkan kualitas barang dan/ atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/ atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.³⁵

Pasal 3 UUPK ini, merupakan isi pembangunan nasional sebagaimana disebutkan dalam pasal 2 sebelumnya, karena tujuan perlindungan konsumen yang ada itu merupakan sasaran akhir yang harus dicapai dalam pelaksanaan pembangunan di bidang hukum perlindungan konsumen³⁶.

c. Landasan Hukum Tentang Perlindungan Konsumen

Landasan Hukum Tentang Perlindungan Konsumen yaitu:

- 1) Undang-undang nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- 2) Peraturan Pemerintah R.I nomor 57 Tahun 2001 Tentang Badan Perlindungan Konsumen Nasional.

³⁵ *Ibid.*

³⁶ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 30.

- 3) Peraturan Pemerintah R.I nomor 58 Tahun 2001 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen.
- 4) Peraturan Pemerintah R.I nomor 59 Tahun 2001 Tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat.³⁷

d. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

Pasal 6 UUPK pelaku usaha mempunyai hak sebagai berikut:

- 1) Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- 2) Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- 3) Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- 4) Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- 5) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.³⁸

Hak pelaku usaha untuk menerima pembayaran sesuai kondisi dan nilai tukar barang dan/ atau jasa yang diperdagangkan, menunjukkan bahwa pelaku usaha tidak dapat menuntut lebih banyak

³⁷ Ahmadi Miru, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 30.

³⁸ *Ibid.*

jika kondisi barang dan/atau jasa yang diberikannya kepada konsumen tidak atau kurang memadai menurut harga yang berlaku pada umumnya atas barang dan/atau jasa yang sama. Dalam praktek yang biasa terjadi, suatu barang dan/atau jasa yang kualitasnya lebih rendah daripada barang yang serupa, maka para pihak menyepakati harga yang lebih murah. Dengan demikian yang dipentingkan dalam hal ini adalah harga yang wajar.³⁹ UUPK tidak hanya mengatur hak pelaku usaha saja, tetapi juga mengatur mengenai kewajiban pelaku usaha. Dalam Pasal 7 UUPK kewajiban pelaku usaha, antara lain:

- 1) Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- 2) Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/ atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- 3) Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- 4) Menjamin mutu barang dan/ atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- 5) Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/ atau yang diperdagangkan;

³⁹ *Ibid*, h. 51.

- 6) Memberi kompensasi, ganti rugi dan/ atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- 7) Memberi Kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/ atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian UUPK mengatur pelaku usaha untuk beriktikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya, sedangkan bagi konsumen diwajibkan beriktikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/ atau jasa.⁴⁰

UUPK menekankan bahwa iktikad baik lebih ditekankan pada pelaku usaha, karena meliputi semua tahapan dalam melakukan kegiatan usahanya, sehingga dapat diartikan bahwa kewajiban pelaku usaha untuk beriktikad baik dimulai sejak barang dirancang atau diproduksi sampai pada tahap penjualan, sebaliknya konsumen hanya diwajibkan beriktikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/ atau jasa. Hal ini tentu saja disebabkan karena kemungkinan terjadinya kerugian bagi konsumen dimulai sejak barang dirancang atau diproduksi oleh produsen (pelaku usaha), sedangkan bagi konsumen, kemungkinan untuk dapat merugikan produsen mulai pada saat melakukan transaksi dengan produsen.⁴¹

Menurut Pasal 19 UUPK pelaku usaha mempunyai tanggung jawab. Tanggung jawab pelaku usaha adalah:

⁴⁰ *Ibid*, h. 54.

⁴¹ *Ibid*, h. 56.

- 1) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
- 2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Pemberian gantirugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.
- 4) Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.
- 5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.⁴²

Memperhatikan substansi pasal 19 ayat (1) dapat diketahui bahwa tanggung jawab pelaku usaha, meliputi:

- 1) Tanggung jawab ganti kerugian atas kerusakan;
- 2) Tanggung jawab kerugian atas pencemaran;

⁴² *Ibid.*

- 3) Tanggung jawab kerugian atas kerugian konsumen.⁴³

e. Hak dan Kewajiban Konsumen

Pasal 4 UUPK diatur mengenai hak konsumen. Hak konsumen adalah:

- 1) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/ atau jasa;
- 2) Hak untuk memilih barang dan/ atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- 3) Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- 4) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- 5) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- 6) Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- 7) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- 8) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/ atau penggantian, apabila barang dan/ atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;

⁴³ *Ibid*, h. 126.

- 9) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.
- 10) Hak konsumen sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 UUPK lebih luas dari pada hak-hak dasar konsumen sebagaimana pertama kali dikemukakan oleh Presiden Amerika Serikat J.F. Kennedy di depan Kongres pada tanggal 15 Maret 1962, yang terdiri dari;
- 11) Hak memperoleh keamanan;
- 12) Hak memilih;
- 13) Hak mendapat informasi;
- 14) Hak untuk didengar.⁴⁴

Keempat hak tersebut merupakan bagian dari Deklarasi Hak-Hak Asasi Manusia yang dicanangkan PBB pada tanggal 10 Desember 1948, masing-masing pada Pasal 3, 8, 19, 21, dan pasal 26, yang oleh Organisasi Konsumen Sedunia (*Organization of Consumer Union-IOCU*) ditambahkan empat hak dasar konsumen lainnya, yaitu:

- 1) Hak untuk memperoleh kebutuhan hidup;
- 2) Hak untuk memperoleh ganti rugi;
- 3) Hak untuk memperoleh pendidikan konsumen;
- 4) Hak untuk memperoleh lingkungan hidup yang bersih dan sehat.⁴⁵

Masyarakat Eropa (*Europese Economische Gemeenschap* atau *EEG*) juga telah menyepakati lima hak dasar konsumen sebagai berikut:

⁴⁴ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 39.

⁴⁵ *Ibid*, h. 46.

- 1) Hak perlindungan kesehatan dan keamanan (*recht op bescherming van zijn gezondheid en veiligheid*);
- 2) Hak perlindungan kepentingan ekonomi (*recht op bescherming van zijn economische belangen*);
- 3) Hak mendapat ganti rugi (*recht op schadevergoeding*);
- 4) Hak atas penerangan (*recht op voorlichting en vorming*);
- 5) Hak untuk didengar (*recht om te worden gehoord*).⁴⁶

Beberapa rumusan tentang hak-hak konsumen yang telah dikemukakan secara garis besar dapat dibagi dalam tiga hak yang menjadi prinsip dasar, yaitu:

- 1) Hak yang dimaksudkan untuk mencegah konsumen dari kerugian, baik kerugian personal, maupun kerugian harta kekayaan.
- 2) Hak untuk memperoleh barang dan/ atau jasa dengan harga yang wajar.
- 3) Hak untuk memperoleh penyelesaian yang patut terhadap permasalahan yang dihadapi.⁴⁷

Oleh karena itu, ketiga hak prinsip dasar tersebut merupakan himpunan beberapa hak konsumen sebagaimana diatur dalam UUPK, maka hal tersebut sangat esensial bagi konsumen, sehingga dapat dijadikan/ merupakan prinsip perlindungan konsumen di Indonesia. Kewajiban konsumen juga diatur di dalam Pasal 7 UUPK. Kewajiban konsumen antara lain:

⁴⁶ *Ibid*, h. 74.

⁴⁷ *Ibid*, h. 47.

- 1) Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- 2) Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- 3) Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Menyangkut kewajiban konsumen beritikad baik hanya tertuju pada transaksi pembelian barang atau jasa. Hal ini tentu saja disebabkan karena bagi konsumen, kemungkinan untuk dapat merugikan produsen mulai pada saat melakukan transaksi dengan produsen. Berbeda dengan pelaku usaha kemungkinan terjadinya kerugian bagi konsumen dimulai sejak barang dirancang atau diproduksi oleh produsen (pelaku usaha).⁴⁸

Kewajiban lain yang perlu mendapat penjelasan lebih lanjut adalah kewajiban konsumen mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut. Kewajiban ini dianggap sebagai hal baru, sebab sebelum diundangkannya UUPK hampir tidak dirasakan adanya kewajiban secara khusus seperti ini dalam perkara perdata, sementara dalam kasus pidana tersangka/ terdakwa lebih banyak dikendalikan oleh aparat kepolisian dan/ atau kejaksaan.⁴⁹

Kewajiban seperti ini diatur dalam UUPK dianggap tepat, sebab kewajiban ini adalah untuk mengimbangi hak konsumen untuk mendapatkan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut. Hak ini akan menjadi lebih mudah diperoleh jika

⁴⁸ *Ibid*, h. 48.

⁴⁹ *Ibid*, h. 49.

konsumen mengikuti penyelesaian sengketa secara patut. Hanya saja kewajiban konsumen ini, tidak cukup untuk maksud tersebut jika tidak diikuti oleh kewajiban yang sama dari pihak pelaku usaha.⁵⁰

Berikutnya perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha dalam memperdagangkan barangnya, tercantum dalam pasal 8 ayat 1e Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, berbunyi:

- 1) Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan jasa tersebut.
- 2) Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan jasa tersebut.
- 3) Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat, isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang dibuat.
- 4) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.
- 5) Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat 1 dan ayat 2 dilarang memperdagangkan barang atau jasa tersebut serta wajib

⁵⁰ *Ibid*, h. 50.

menariknya dari peredaran. Apabila terdapat masalah atau sengketa terhadap transaksi yang dilakukan, juga dapat diselesaikan dengan cara nonlitigasi (nonformal) dan atau litigasi (formal).⁵¹

Di dalam pasal 9 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen juga terdapat larangan bagi pelaku usaha diantaranya:

- 1) Pelaku usaha dilarang menawarkan, memproduksi, mengiklankan suatu barang atau jasa secara tidak benar, dan seolah-olah barang tersebut telah memenuhi dan memiliki potongan harga, harga khusus, standar mutu tertentu, gaya atau mode tertentu, karakteristik tertentu, sejarah atau guna tertentu.
- 2) Pelaku usaha dilarang menawarkan, memproduksi, mengiklankan suatu barang atau jasa secara tidak benar, seolah-olah barang tersebut dalam keadaan baik atau baru
- 3) Pelaku usaha dilarang menawarkan, memproduksi, mengiklankan suatu barang atau jasa secara tidak benar, dan seolah-olah barang tersebut tidak mengandung cacat tersembunyi. Begitu banyak larangan-larangan yang perlu dipatuhi oleh pelaku usaha atau penjual. Begitu banyak pula cara-cara atau strategi menyelesaikan suatu sengketa atau masalah dalam bisnis, bisa dengan cara negosiasi, mediasi, pengadilan, atau arbitrase.⁵²

⁵¹ Fitrotin Jamilah, *Strategi Penyelesaian Sengketa Bisnis* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2014), h. 27.

⁵² *Ibid*, h. 26.

Cara negosiasi adalah cara penyelesaian perkara yang dilakukan antara pihak-pihak yang bersengketa tanpa adanya pihak ketiga. Cara mediasi adalah cara penyelesaian perkara yang dilakukan antara pihak-pihak yang bersengketa dengan memerlukan adanya pihak ketiga. Cara arbitrase adalah suatu tindakan hukum ketika ada pihak yang menyerahkan sengketa atau selisih pendapat antara dua orang atau lebih kepada seseorang atau ahli yang disepakati bersama dengan tujuan memperoleh satu keputusan final dan mengikat.

Sedangkan cara pengadilan adalah cara penyelesaian perkara yang dilakukan antara pihak-pihak yang berperkara dengan mengajukan perkara atau suatu sengketa kepada badan hukum supaya diadili secara hukum yang berlaku.⁵³

Dalam pasal 11 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha dalam hal penjualan yang dilakukan melalui cara obral atau lelang, dilarang mengelabui atau menyesatkan konsumen dengan menyatakan barang atau jasa tersebut seolah-olah telah memenuhi standar mutu tertentu dan menyatakan barang atau jasa tersebut seolah-olah tidak mengandung cacat tersembunyi.⁵⁴

Dalam sebuah transaksi jual beli juga tidak boleh terjadi unsur pemaksaan, terutama dari pihak pelaku usaha atau penjual, ini diatur dalam pasal 15 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang

⁵³ *Ibid*, h. 27.

⁵⁴ *Ibid*.

Perlindungan Konsumen, berbunyi “pelaku usaha dalam menawarkan barang atau jasa yang dilarang melakukan dengan cara pemaksaan atau cara lain yang dapat menimbulkan gangguan baik fisik maupun psikis terhadap konsumen.”

Penggunaan strategi penyelesaian sengketa yang telah dijelaskan sebelumnya apabila benar-benar mendesak perlu dilakukan, dapat memberikan manfaat, diantaranya: dapat memenuhi tuntutan masyarakat terhadap mekanisme yang efisien dan mampu memenuhi rasa keadilan serta dapat mengimbangi meningkatnya daya kritis masyarakat yang disertai dengan tuntutan berperan secara aktif dalam proses pembangunan (terutama pengambilan keputusan terhadap urusan-urusan publik).⁵⁵ Dan apabila penyelesaian-penyelesaian sengketa tersebut benar-benar dilaksanakan, maka hasil umumnya pihak pelaku usahalah atau penjual yang bertanggung jawab terhadap apa-apa yang berdampak merugikan dipihak konsumen atau pembeli.

Tanggung jawab pelaku usaha atau penjual ini diatur dalam pasal 19 ayat 1 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, berbunyi “pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang atau jasa yang dihasilkan dan diperdagangkan”. Pasal 19 ayat 2 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, berbunyi “ganti rugi sebagaimana

⁵⁵Runtung Sitepu, *Keberhasilan dan Kegagalan Penyelesaian Sengketa Alternatif* (Yogyakarta: Andi, 2002), h. 18.

dimaksud pada ayat 1 dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang atau jasa yang sejenis, setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.⁵⁶

Akan tetapi tanggung jawab tersebut tidak perlu dilakukan oleh pelaku usaha apabila dalam transaksi yang melakukan kesalahan adalah pihak konsumen atau pembeli, ini diatur dalam pasal 19 ayat 5 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, berbunyi “ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen”.⁵⁷

Dalam sebuah transaksi bisnis sangat dituntut kejujuran masing-masing pelaku transaksi. Apabila tidak mampu memenuhi tuntutan tersebut maka salah satunya diatur dalam pasal 23 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, berbunyi “pelaku usaha yang menolak dan tidak memberi tanggapan atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4, dapat digugat melalui badan penyelesaian sengketa konsumen atau mengajukan ke badan peradilan di tempat kedudukan konsumen”.

Menyelesaikan sengketa melalui badan penyelesaian sengketa atau badan peradilanpun juga tidak mudah, pasti ada beberapa hal yang

⁵⁶ *Ibid.*

⁵⁷ *Ibid.*

perlu dipertimbangkan karena mempunyai kelebihan-kelebihan dan kelemahan-kelemahan, dalam hal ini bisa diambil contoh misalnya BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia).

Pada umumnya, lembaga arbitrase mempunyai kelebihan dibandingkan dengan lembaga peradilan umum, diantaranya:

- 1) Sidang arbitrase adalah tertutup untuk umum sehingga kerahasiaan sengketa para pihak terjamin.
- 2) Para pihak yang bersengketa dapat memilih arbiter yang menurut keyakinannya mempunyai pengalaman, pengetahuan, jujur, dan adil. Serta latar belakang yang cukup mengenai masalah yang disengketakan.
- 3) Pilihan hukum untuk menyelesaikan sengketa serta proses dan tempat penyelenggaraan arbitrase dapat ditentukan oleh para pihak.
- 4) Keterlambatan yang diakibatkan oleh hal prosedural dan administratif dapat dihindari.
- 5) Sikap arbiter atau majelis arbiter dalam menangani perkara arbitrase didasarkan pada sikap yang mengusahakan *win-win solution* (saling untung bagi pihak berperkara) terhadap para pihak yang bersengketa.
- 6) Putusan arbitrase mengikat para pihak dan dengan melalui tata cara/prosedur sederhana ataupun langsung dapat dilaksanakan.
- 7) Suatu perjanjian arbitrase tidak menjadi batal karena berakhir atau batalnya perjanjian pokok.

8) Didalam proses arbitrase, arbiter atau majelis arbitrase harus mengutamakan perdamaian diantara pihak yang bersengketa.⁵⁸

Selain kelebihan-kelebihan tersebut di atas, terdapat juga kelemahan-kelemahan dari arbitrase, yaitu:

- 1) Putusan arbitrase ditentukan oleh kemampuan teknis arbiter untuk memberikan keputusan yang memuaskan dan sesuai dengan rasa keadilan para pihak.
- 2) Apabila pihak yang kalah tidak mau melaksanakan putusan arbitrase, maka diperlukan perintah dari pengadilan untuk melakukan eksekusi atas putusan arbitrase tersebut.
- 3) Pada praktiknya pengakuan dan pelaksanaan keputusan arbitrase asing masih menjadi hal yang sulit.
- 4) Pada umumnya pihak-pihak yang bersengketa di arbitrase adalah perusahaan-perusahaan besar. Oleh karena itu, untuk mempertemukan kehendak para pihak yang bersengketa dan membawanya ke badan arbitrase tidaklah mudah.⁵⁹

Meskipun keputusan majelis arbitrase bersifat final dan mengikat kedua belah pihak, namun dalam hal-hal tertentu dapat dimintakan pembatalan, yaitu sebagai berikut:

- a. Majelis tidak berfungsi sebagaimana mestinya.
- b. Majelis nyata-nyata melebihi wewenangnya.
- c. Adanya korupsi pada salah satu anggota majelis.

⁵⁸ Fitrotin Jamilah, *Strategi Penyelesaian Sengketa*, h. 102.

⁵⁹ *Ibid.*

- d. Adanya penyimpangan yang serius terhadap rule and procedure yang bersifat fundamental.
- e. Keputusan tersebut gagal memberi alasan yang layak untuk mana keputusan tersebut didasarkan.⁶⁰

Sementara itu, dalam sebuah transaksi bisnis misalnya jual beli, penjual bukanlah pihak yang satu-satunya harus bertanggung jawab terhadap barang yang diperdagangkan. Dengan kata lain yang bisa dimintai tanggung jawab bisa dari pihak agen atau distributor barang dagangan. Ini dibuktikan dengan adanya aturan pasal 24 ayat 1a Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, berbunyi “pelaku usaha yang menjual barang atau jasa kepada pelaku usaha lain bertanggung jawab atas tuntutan ganti rugi dan gugatan konsumen apabila pelaku usaha lain menjual kepada konsumen tanpa melakukan perubahan apapun atas barang atau jasa tersebut.” Dan pasal 24 ayat 1b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, berbunyi “pelaku usaha yang menjual barang atau jasa kepada pelaku usaha lain bertanggung jawab atas tuntutan ganti rugi atau gugatan konsumen apabila pelaku usaha lain, didalam transaksi jual beli tidak mengetahui adanya perubahan barang atau jasa yang dilakukan oleh pelaku usaha atau tidak sesuai dengan contoh, mutu, dan komposisi”.

⁶⁰ Ana Rokhmatusa'dyah, *Hukum Investasi dan Pasar Modal* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 125.

Pelaku usaha yang berperan sebagai agen atau distributor juga dapat terbebas dari tanggung jawab, ini diatur dalam pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, berbunyi “pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dibebaskan dari tanggung jawab atas tuntutan ganti rugi dan/ atau gugatan konsumen apabila pelaku usaha lain yang membeli barang atau jasa menjual kembali kepada konsumen dengan melakukan perubahan atas barang dan jasa tersebut”.

2. Perlindungan Konsumen Menurut Hukum Islam

a. Sejarah Perlindungan Konsumen dalam Islam.

Sebelum Islam datang, Mekkah telah menjadi pusat perhatian seluruh kabilah jazirah Islam karena adanya Ka’bah, dan suku Quraisy yang berdomisili di Mekkah di kenal sebagai penjaga ka’bah yang merupakan tempat suci bagi bangsa Arab. Suku Quraisy mendapat keuntungan besar atas status mereka sebagai pemelihara Ka’bah, terutama dalam hal perdagangan. Keuntungan suku Quraisy tersebut di petik dalam skala yang lebih besar, yakni terjalannya hubungan politik ekonomi dan perdagangan yang lebih luas. Hal ini di buktikan dengan terbitnya perizinan perjalanan dan jaminan keamanan berdagang (aylaf) bagi suku Quraisy dari penguasa Negara-negara tetangga, pada waktu itu adalah Irak, Syria, Yaman, dan Eropa. Karena pada itu pula Mekkah dianggap sebagai ibukota seluruh jazirah Arab, dan juga di pandang

sebagai pusat perdagangan jazirah Arab.⁶¹ Pada saat itu, Mekkah telah mencapai kesuksesan yang sangat mencengangkan. Kota itu berubah menjadi pusat perdagangan internasional. Para pedagang dan pemodalnya telah menjadi kaya raya melampaui impian-impian tertinggi mereka. Hanya beberapa generasi pendahulu mereka hidup dalam kemeralatan dan serba kekurangan, kini Mekkah telah menjadi kiblat perdagangan.⁶² Keberhasilan bangsa Quraisy dalam perdagangan bukan tanpa alasan. Dalam *The Wealth of Nations*, Adam Smith yang dianggap sebagai bapak Ilmu Ekonomi, mengutip buku Doctor Pocock, yang menceritakan bahwa ketika para pedagang Muslim akan memasuki suatu kota untuk berjualan, mereka akan mengundang orang-orang yang lewat, termasuk orang miskin, untuk makan. Perdagangan bagi suku Quraisy dan bangsa Arab Umumnya merupakan fakta yang terjadi sebagai akibat dari tandus dan gersangnya wilayah arab, sehingga sector pertanian buan menjadi pilihan utama bagi bangsa Arab. Mereka makan bersama dan bersila, memulai makan dengan bismillah dan mengakhiri dengan hamdalah. Demikianlah kiat para pedagang muslim memelihara kepentingan bisnisnya, yakni dengan bermurah hati dan sambutan yang hangat.

Muhammad ibn Habib Bagdadi dalam bukunya Kitab Al-Muhabbar, mencatat tiga belas festival perdagangan di jazirah Arab pada zaman jahiliah. Seluruh pasar dagang ini mampu mengundang pedagang

23. ⁶¹ Muhammad Husain Haekal, *Sejarah Hidup Muhammad* (Jakarta: Tintamas, 1984), h.

⁶² Karen Armstrong, *Muhammad Prophet For Our Time* (Bandung: Mizan, 2007), h. 57.

dan pembeli dari timur dan selatan secara berkelompok untuk melakukan perdagangan.⁶³ Secara historis, sejarah perlindungan konsumen dalam Islam di mulai pada saat Muhammad (sebelum diangkat menjadi Rasulullah) membawa barang dagangan Khadijah binti Khuwailid dengan mendapatkan imbalan dan/ atau upah. Kendatipun tidak banyak literature yang berbicara tentang aspek perlindungan konsumen pada saat perdagangan yang dilakukan Rasulullah, namun dapat menemukan prinsip-prinsip perlindungan konsumen dari praktik perdagangan yang dilakukan oleh Rasulullah. Kejujuran, keadilan dan integritas Rasulullah tidak diragukan lagi oleh penduduk Mekkah, sehingga potensi tersebut meningkatkan reputasi dan kemampuannya dalam memperdagangkan barang dagangan Khadijah. Karena kejujuran dan prestasinya tersebut, Rasulullah berhasil menjual barang dagangan dengan mendapat keuntungan yang lebih banyak dibandingkan dengan pernah dilakukan orang lain sebelumnya.⁶⁴ Setelah Muhammad diangkat menjadi Rasulullah, konsumen juga mendapat perhatian dalam ajaran Islam, baik dalam Al-Qur'an maupun Hadis.

Konsep ekonomi dan perdagangan dalam Islam harus dilandasi dengan nilai-nilai dan etika yang menjunjung tinggi kejujuran dan keadilan bisnis. menunjukkan bahwa Rasulullah telah banyak memberikan contoh dalam melakukan perdagangan secara adil dan jujur. Selain itu pula, Rasulullah telah meletakkan prinsip-prinsip yang mendasar tentang

⁶³ Sami bin Abdullah al-Maghlust, *Atlas Perjalanan Hidup Nabi Muhammad* (Jakarta: AlMahira, 2009), h. 65.

⁶⁴ Jusmaliani, *Bisnis Berbasis Syariah* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h. 49.

pelaksanaan perdagangan yang adil dan jujur. Salah satu prinsip yang diletakkan Rasulullah adalah berkaitan dengan mekanisme pasar, dalam interaksi perdagangan kedua belah pihak dapat saling menjual dan membeli barang secara ikhlas tanpa ada campur tangan, intervensi, dan paksaan dalam harga.⁶⁵

Namun jika pasar dalam keadaan tidak sehat, di mana terjadi kasus penipuan, penimbunan, atau perusakan pasokan dengan tujuan menaikkan harga yang berujung pada kerugian konsumen. Maka menurut Ibnu Taimiyah pemerintah wajib melakukan regulasi harga pada tingkat yang adil antara produsen dan konsumen tanpa ada pihak yang dirugikan atau dieksploitsi oleh pihak lain.⁶⁶

Setelah Rasulullah hijrah dan berkuasa di Madinah, berbagai prinsip ekonomi yang tidak adil dan menjerumus kepada penzaliman telah dihapus dan dilarang melakukannya. Seperti penahanan stok, spekulasi, kolusi oligarki, pembatalan informasi penting tentang produk, penjualan dengan sumpah palsu, atau informasi menyesatkan.⁶⁷

Praktik-praktik perdagangan yang dilarang Rasulullah pada masa pemerintahan Rasulullah di Madinah di antaranya:

- a. Talaqqi Rukban, ialah mencegat pedagang yang membawa barang dari tempat produksi sebelum sampai kepasar. Rasulullah melarang

⁶⁵ *Ibid*, h. 55.

⁶⁶ Ikhwani Hamdani, *Sistem Pasar, Pengawasan Ekonomi (Hisbah) Dalam Perspektif Ekonomi Islam* (Jakarta: Nur Ihsani, 2003), h. 28.

⁶⁷ Muhammad Akram Khan, *Ajaran Nabi Muhammad SAW Tentang Ekonomi* (Jakarta: Bank Muamalat, 1996), h. 151.

tindakan ini dengan tujuan untuk menghindari ketidaktahuan konsumen atau produsen tentang harga barang.

- b. Perdagangan Gisyah, ialah menyembunyikan cacat barang yang dijual, bias juga mencampurkan produk cacat ke dalam barang yang berkualitas tinggi, sehingga konsumen akan mengalami kesulitan untuk mengetahui secara tepat kualitas barang yang diperdagangkan, dengan demikian penjual akan mendapatkan harga yang tinggi untuk barang yang cacat atau kualitas buruk. Adapun, pada hakikatnya konsumen membutuhkan informasi yang jelas tentang kualitas barang yang akan dia beli.
- c. Perdagangan Majasy, ialah praktek perdagangan dimana seseorang berpura-pura sebagai pembeli yang menawar tinggi harga barang disertai pujian kualitas secara tidak wajar, dengan tujuan untuk menaikkan harga barang.⁶⁸
- d. Produk haram, ialah memperdagangkan barang-barang yang telah dilarang dan di haramkan oleh Al-Qur'an dan Sunnah. Hal ini tentu saja sangat berkaitan dengan keselamatan konsumen dalam memberi barang dagangan tersebut, baik keselamatan jasmaniah maupun keselamatan rohaniah.
- e. Riba, ialah pengambilan tambahan dalam transaksi jual beli maupun simpan pinjam yang berlangsung secara lazim dan bertentangan dengan prinsip muamalat secara Islamiah.

⁶⁸ Abul Futuh habiri, *Sukses Bisnis Berkat Wasiat Nabi* (Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2007), h. 56.

f. *Tathfif*, ialah tindakan yang mengurangi timbangan atau takaran barang yang akan dijual, tentu saja praktik perdagangan seperti ini sangat merugikan konsumen.⁶⁹

Dari sejumlah praktik perdagangan yang dilarang tersebut dapat ditarik benang merah, bahwa prinsip perdagangan yang diajarkan Rasulullah mengandung nilai-nilai perlindungan terhadap hak-hak konsumen. Ketentuanketentuan larangan tersebut membuktikan secara terang benderang, bahwa praktik perdagangan yang diajarkan Islam berpijak dari perlindungan hak-hak konsumen, kendatipun pada saat itu terminologi “konsumen” belum dikenal. Karena itu pula, kejujuran, keadilan dan transparansi merupakan pokok ajaran Islam dalam perdagangan.

Uraian tersebut juga membuktikan, bahwa sebelum barat dan dunia modern mengenal pengaturan perlindungan konsumen, Islam telah menjalankan prinsip-prinsip perlindungan konsumen. Namun pengaturan perlindungan konsumen yang ada pada masa Rasulullah tersebut belum terperinci secara empiris, karena terbatas teknologi pada saat itu. Kendatipun demikian, Rasulullah telah berhasil meletakkan dasar-dasar perlindungan konsumen akhirnya diadopsi oleh dunia modern sekarang. Hal ini sekaligus bantahan terhadap beberapa penulis yang menyatakan bahwa tokoh-tokoh barat adalah sumber dan pendekar perlindungan

⁶⁹ *Ibid.*

konsumen, karena perhatian dan apresiasi tokoh-tokoh tersebut terhadap perlindungan konsumen.

b. Dasar Hukum Perlindungan Konsumen dalam Hukum Islam

Landasan Hukum Perlindungan Konsumen dalam Hukum Islam

Sumber hukum dalam Islam yang telah disepakati oleh para *fuqaha* ada 4, yaitu berdasarkan Al-Qur'an, Sunnah, *Ijma'*, dan *Qiyas*. Sumber-sumber hukum ini dijadikan sebagai acuan dalam pengambilan hukum perlindungan konsumen dalam Islam. Al-Qur'an merupakan sumber hukum pertama (sumber primer) dalam ajaran Islam. Sunnah adalah sumber hukum kedua (sumber sekunder) setelah Al-Qur'an, dan dapat dijadikan sumber hukum pertama (sumber primer) apabila tidak ditemukan penjelasan atas suatu masalah di dalam Al-Qur'an. Adapun *ijma'* adalah kesepakatan semua *mujtahid* dari kalangan umat Islam pada suatu masa, setelah *wafatnya* Rasulullah SAW atas suatu hukum syara' mengenai suatu kejadian maupun kasus. *Ijma'* hanya ditetapkan setelah *wafatnya* Rasulullah SAW dan hanya dapat dijadikan sebagai sumber hukum apabila tidak ditemukan penjelasan atau norma-norma hukum di dalam Al-Qur'an maupun sunnah mengenai suatu masalah atau kasus. Sedangkan *qiyas* adalah menghubungkan suatu kejadian yang tidak ada nash-nya kepada kejadian yang ada nash-nya, dalam hukum yang telah ditetapkan oleh nash. *Qiyas* ini merupakan metode dalam pengambilan hukum yang didasarkan pada illat-illat hukum yang terkandung di dalamnya. Seperti dalam Al-Quran surat Al Baqarah 279, yang berbunyi:

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۖ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ
أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلُمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٩﴾

Artinya: “Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.” (QS. Al-Baqarah : 279)

Sepintas ayat ini memang berbicara tentang riba, tetapi secara implisit mengandung pesan-pesan perlindungan konsumen. Di akhir ayat tersebut disebutkan tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya (tidak dizalimi dan tidak pula dizalimi). Dalam konteks perdagangan, tentu saja potongan akhir ayat tersebut mengandung perintah perlindungan konsumen, bahwa antara pelaku usaha dan konsumen dilarang untuk saling menzalimi/ atau menganiaya.⁷⁰

c. Tujuan dan Hak Perlindungan Konsumen dalam Hukum Islam

- 1) Tujuan perlindungan konsumen dalam hukum Islam adalah untuk mewujudkan *mashlahah* (kemaslahatan) bagi umat manusia.
- 2) Hak-hak konsumen perspektif Islam

Islam pada masa Rasulullah belum mengungkapkan pengaturan perlindungan konsumen secara empiris seperti saat ini. Walaupun penuh dengan keterbatasan teknologi pada saat itu, namun perlindungan konsumen yang diajarkan Rasulullah sangat mendasar, sehingga pengaturan tersebut menjadi cikal bakal produk hukum perlindungan

⁷⁰ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, h.41

konsumen modern.⁷¹ Seluruh ajaran Islam yang terkait dengan perdagangan dan perekonomian berorientasi pada perlindungan hak-hak pelaku usaha atau produsen dan konsumen. Kerena Islam menghendaki adanya unsur keadilan, keadilan dan transparansi yang dilandasi nilai keimanan dalam praktik perdagangan dan peralihan hak. Terkait dengan hak-hak konsumen, Islam memberikan ruang bagi konsumen dan produsen untuk mempertahankan hak-haknya dengan perdagangan yang dikenal dengan istilah *khiyar* dengan beragam jenisnya sebagai berikut:⁷²

1) *Khiyar* Majelis

As-Sunnah menetapkan bahwa kedua belah pihak yang berjual beli memiliki *khiyar* (pilihan) dalam melangsungkan atau membatalkan akad jual beli selama keduanya masih dalam satu majelis (belum berpisah). *Khiyar* merupakan hak yang ditetapkan untuk pelaku usaha dan konsumen, jika terjadi ijab dan kabul antara produsen dan konsumen, dan akadnya telah sempurna, maka masing-masing pihak memiliki hak untuk mempertahankan atau membatalkan akad selama masih dalam satu majelis.

2) *Khiyar* Syarat

Khiyar syarat adalah salah satu pihak yang berakad membeli sesuatu dengan keentuan memiliki *khiyar* selama jangka waktu yang jelas. Selama waktu tersebut, jika pembeli menginginkan, ia bisa melaksanakan jual beli tersebut atau membatalkannya. Syarat ini juga

⁷¹ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, h. 58.

⁷² *Ibid*, h. 58-59.

oleh bagi kedua belah pihak yang berakad secara bersama-sama, juga boleh bagi salah satu pihak saja ia mempersyaratkannya.⁷³

3) *Khiyar Aibi*

Haram baginya seseorang menjual barang yang memiliki cacat (cacat produk) atau tanpa menjelaskan kepada pembeli (konsemen).

4) *Khiyar Tadlis*

Yaitu, jika penjual mengelabui pembeli sehingga menaikkan harga barang, maka haram baginya. Dalam hal ini pembeli memiliki *khiyar* selama tiga hari, adanya *khiyar* untuk mengembalikan barang tersebut.

5) *Khiyar Ru'yah*

Khiyar jenis ini terjadi bila pelaku usaha menjual barang dagangannya sementara barang tersebut tidak ada di dalam majelis jual beli. Jika pembeli kemudian melihat barang tersebut dan tidak berminat terhadapnya, atau pembeli melihat bahwa barang tersebut tidak sesuai dengan keinginannya, maka pembeli berhak menarik membatalkan diri dari akad jual beli tersebut.⁷⁴

6) *Khiyar Ta'yin*

Khiyar jenis ini memberikan hak kepada pembeliannya untuk memilih barang yang dia inginkan dari sejumlah atau kumpulan barang yang di jual kendatikan barang tersebut berbeda harganya, sehingga konsumen dapat menentukan barang yang dia kehendaki. Misalnya, “seseorang membeli 4 (empat) ekor kambing dari sekumpulan kambing, maka

⁷³ *Ibid*, h. 59.

⁷⁴ *Ibid*, h. 62.

pembeli diberi hak *khiyar ta'yin* sehingga ia dapat menentukan 4 (empat) ekor kambing yang dia inginkan diantara sekumpulan kambing itu” Sekilas, memang istilah-istilah perlindungan hak-hak konsumen dalam Islam berbeda dengan istilah perlindungan hak-hak konsumen pada saat ini. Namun jika dikaji secara mendalam dari sisi pengaturan, nilai, dan tujuan memiliki peran dan fungsi yang sama dalam perlindungan hak-hak konsumen. Dibandingkan antara *khiyar aibi* dengan *the right to safety*, *khiyar ta'yin* dengan *the right to choose*, *khiyar tadlis* dan *aibi* dengan *the right to be informed*, *khiyar ru'yah* dengan *the right to be heard*.⁷⁵

d. Tanggung Jawab Perlindungan Konsumen dalam Islam

Tanggung jawab jika dihubungkan dengan penyebab adanya ganti rugi (*dhaman*) dapat dibedakan menjadi lima, yaitu :

- 1) Ganti Rugi Karena Perusakan (*Dhaman Itlaf*)
- 2) Ganti Rugi Karena Transaksi (*Dhaman 'Aqdin*)
- 3) Ganti Rugi Karena Perbuatan (*Dhaman Wadh'u Yadin*)
- 4) Ganti Rugi Karena Penahanan (*Dhaman al-Hailulah*)
- 5) Ganti Rugi Karena Tipu daya (*Dhaman al-Maghrur*)⁷⁶

Dhaman Itlaf adalah ganti rugi akibat dari perusakan barang. Ganti rugi *itlaf* tidak hanya berhubungan dengan kerusakan harta benda saja, tetapi juga menyangkut jiwa dan anggota tubuh manusia. *Dhaman 'aqdin* adalah terjadinya suatu aqad atau transaksi sebagai penyebab

⁷⁵ *Ibid*, h. 62-63.

⁷⁶ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2012), h. 101.

adanya ganti rugi atau tanggung jawab. Ganti rugi *wadh'u yadin* adalah ganti rugi akibat dari kerusakan barang yang masih berada di tangan penjual apabila barang belum diserahkan dalam sebuah aqad yang sah dan ganti rugi karena perbuatan mengambil harta orang lain tanpa izin. *Dhaman al-hailulah* adalah ganti rugi pada jasa penitipan barang (*alwadi*) jika terjadi kerusakan atau hilang, baik kerusakan atau hilangnya itu disebabkan karena kelalaian atau kesengajaan orang yang dititipi. *Dhaman al-maghrur* adalah ganti rugi akibat tipu daya. *Dhaman al-maghrur* sangat efektif diterapkan dalam perlindungan konsumen, karena segala bentuk perbuatan yang dapat merugikan orang lain pelakunya harus membayar ganti rugi sebagai akibat dari perbuatannya itu.

Menurut Islam negara memiliki kewenangan untuk turut campur dalam kegiatan ekonomi, baik untuk mengawasi kegiatan pasar maupun untuk mengatur dan melaksanakan kegiatan ekonomi yang tidak mampu dilaksanakan oleh individu-individu. Dasar hukum campur tangan negara dalam ekonomi Islam adalah firman Allah SWT :⁷⁷ Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah SWT dan taatilah Rasul (nya), dan *ulil amri* di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah SWT (Al Quran) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah SWT dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik

⁷⁷ Ika Yunia Fauzia, *Etika Bisnis Dalam Islam* (Jakarta: Kencana, 2013), h. 3.

akibatnya. (An-Nisa : 59) Negara dalam mengatur dan mengawasi kondisi prekonomian masyarakat melalui sebuah lembaga yang bernama “al-hisbah”. Melalui lembaga al-hisbah ini negara melakukan kontrol terhadap kondisi sosial dan ekonomi secara konperhensif atas kegiatan perdagangan dan praktik-praktik ekonomi. Selain itu lembaga al-hisbah ini memiliki tugas dan kewenangan untuk mengawasi industri, jasa profesional, standarisasi produk, memeriksa adanya indikasi penimbunan barang, praktik riba, dan perantara (calo-calo atau makelar).⁷⁸ Pejabat yang bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas lembaga al-hisbah ini disebut muhtasib. Oleh karena itu, kewenangan mengawasi pasar menjadi tanggung jawab *muhtasib*. Selain mengawasi pasar, *muhtasib* juga mengawasi perilaku sosial masyarakat, bagaimana kegiatan mereka dalam melaksanakan kewajiban agama dan bekerja untuk pemerintah. Ada beberapa fungsi ekonomis yang menjadi kewenangan muhtasib, yaitu memenuhi dan mencukupi kebutuhan, pengawasan terhadap industri dan produksi, pengawasan atas jasa, pengawasan atas perdagangan, mengawasi jual beli terlarang, mengawasi standar kehalalan, kesehatan dan kebersihan suatu komoditas, pengaturan pasar, melakukan intervensi pasar, dan memberikan hukuman terhadap pelaku pelanggaran.

⁷⁸ Ahmad Mustaq, *Etika Bisnis Dalam Islam* (Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2003), h. 15.

B. Tinjauan Pustaka

Pembahasan mengenai penjualan makanan ringan tanpa kemasan bersegel dalam tinjauan hukum perlindungan konsumen dan hukum Islam telah penulis temukan dalam tulisan dan beberapa penelitian yang sifatnya sangat beragam. Diantaranya yaitu:

1. Lailatul Maghfiroh dalam skripsinya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Dan Undang-undang No.8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Mekanisme Transaksi Jual Beli Minuman Kemasan Dalam Mesin Otomatis di UNTAG 1945 Surabaya” a. Mekanisme atau cara Transaksi Jual Beli Minuman Kemasan dalam Mesin Otomatis di UNTAG 1945 Surabaya hampir sama dengan cara pengoperasian mesin ATM, pemilik mesin telah mencantumkan mekanisme transaksi jual beli minuman kemasan dalam mesin otomatis dimana ada *klausula* yang didalamnya terdapat harga pada masing-masing produk, atau dengan kata lain ada kesepakatan bahwa konsumen setuju terhadap segala keputusan sepihak yang diambil oleh produsen. b. Mekanisme transaksi jual beli minuman kemasan dalam mesin otomatis (Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya) ini merupakan penggabungan dari konsep teori Caveat Emptor, Caveat Venditor, dan Paternalistik yakni dalam kegiatan transaksi jual beli, konsumen diharapkan untuk berhati-hati dalam pembeliannya sedangkan penjual harus bertanggung jawab dengan produk yang dijualnya. Jadi keseimbangan hak dan kewajiban yang dilakukan antara konsumen dan produsen dapat diwujudkan guna untuk mencegah kerugian

yang dialami konsumen akibat perjanjian yang merugikan mereka. Dalam pandangan hukum Islam, transaksi seperti ini menurut sebagian ulama yaitu Hanafiyah, Malikiyah dan Hambali membolehkan jual beli seperti ini. Sedangkan menurut madzhab Syafi'i, jual beli ini tidaklah sah kecuali dengan adanya ijab dan qobul. Menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, terutama Psl 18, kontrak standar masih dibenarkan. Namun, UUPK melarang dengan tegas kontrak standar yang isinya mengalihkan tanggungjawab pelaku usaha. Dalam kasus ini pemilik mesin telah mencantumkan mekanisme transaksi jual beli minuman kemasan dalam mesin otomatis di mana ada klausula yang didalamnya terdapat harga pada masing-masing produk, atau dengan kata lain ada kesepakatan bahwa konsumen setuju terhadap segala keputusan sepihak yang diambil oleh produsen.⁷⁹

2. Rachmad Charis A dalam skripsinya yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli MP3 Berkemasan Segel di Toko Hikmah Cell Darmo Satelit Surabaya." 1). Praktik jual beli MP3 berkemasan segel di Toko Hikmah Cell Darmo Satelit Surabaya menerapkan ijab kabul yang dilakukan dengan jelas, secara lisan setelah pembeli memilih MP3 bersegel yang kriterianya telah disebutkan penjual, dan harganya pun telah disetujui pembeli. Adapun bentuk akad atau perjanjian jual beli MP3

⁷⁹ Lailatul Maghfiroh "Tinjauan Hukum Islam Dan Undang-undang No.8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Mekanisme Transaksi Jual Beli Minuman Kemasan Dalam Mesin Otomatis (Studi di UNTAG 1945 Surabaya)" (Skripsi Program Sarjana Hukum Islam di Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2010)

berkemasan segel di Toko Hikmah Cell adalah bentuk jual beli yang pembayarannya dilakukan secara tunai, jika ada komplain terhadap MP3 yang dibeli, maka penjual tidak dapat berbuat banyak seperti mengganti rugi jika barang MP3 tersebut ada cacat, karena penjual beranggapan bahwa MP3 yang berkemasan segel sudah terjamin secara kualitas dan walaupun ada cacat maka hal tersebut merupakan kesalahan pihak produksi dan bukan merupakan tanggung jawab pihak penjual. Adanya produk kemasan segel juga tidak dapat disalahkan karena untuk melindungi konsumen dari produk palsu, dan apabila suatu produk tidak diberi segel atau label maka akan melanggar pasal larangan pelaku usaha yaitu pasal 8 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Pelaksanaan praktik jual beli MP3 berkemasan segel di Toko Hikmah Cell Darmo Satelit Surabaya menurut Hukum Islam merugikan konsumen karena konsumen tidak mendapat kualitas barang yang diinginkan (barang mengandung *gharar*) disertai tetap disarankan membeli barang meskipun tidak sesuai keinginan, ini disebabkan sebagai kompensasi telah membuka kemasan segel yang dilakukan pembeli. Akan tetapi keberadaan produk kemasan segel menurut Undang-undang nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen boleh diadakan.⁸⁰

3. Eka Fasya Agustina dalam skripsinya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Produk Olahan Kemasan Yang Tidak

⁸⁰ Rachmad Charis A, “Tinjauan Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli MP3 Berkemasan Segel (Studi di Toko Hikmah Cell Darmo Satelit Surabaya).” (Skripsi Program Sarjana Hukum Islam di Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2012)

Mencantumkan Komposisi Bahan Di Pasar Sayung.” a. Produk olahan kemasan tanpa komposisi bahan yang beredar di Pasar Sayung merupakan produk titipan dari produsen industri rumah tangga yang dititipkan kepada penjual di Pasar Sayung dengan akad bagi hasil, penjual yang dititipi produk tersebut juga kurang mengetahui apa saja yang harus ada dalam produk olahan kemasan guna melindungi hak-hak konsumen. Kurangnya sosialisasi dinas terkait mengenai pentingnya memproduksi barang dan/atau jasa secara baik serta memperhatikan mutu barang kepada produsen dan konsumen membuat produk tanpa komposisi bahan masih banyak beredar di pasaran yang tentunya nanti akan merugikan konsumen. Apabila terdapat konsumen yang merasa dirugikan atas tidak dicantumkan komposisi bahan ini, maka pelaku usaha yang memproduksi barang tersebut harus memberikan ganti rugi kepada konsumen sesuai dengan Undang-Undang NO. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan pelaku usaha juga dapat dikenai sanksi pidana. b. Menurut hukum Islam, bahwa jual beli produk olahan kemasan tanpa komposisi bahan di Pasar Sayung tersebut termasuk jual beli yang sah tapi tidak diperbolehkan (*fasid*). Hal ini dikarenakan belum terpenuhinya *syaratma'qud alaih* karena belum jelasnya bahan-bahan yang terkandung dalam makanan olahan kemasan sehingga dikhawatirkan produk tersebut mengandung zat-zat berbahaya yang akan membahayakan kesehatan konsumen. Hal ini mengartikan bahwa akad dalam jual beli

produk olahan kemasan tanpa komposisi bahan ini sah namun dilarang karena belum jelasnya bahan yang terkandung di dalamnya.⁸¹

Meskipun pada dasarnya penelitian diatas memiliki permasalahan yang hampir sama, namun substansi penelitian yang diajukan berbeda. Pada judul skripsi ini peneliti mencoba mencari perbandingan hukum perlindungan konsumen dengan hukum Islam terhadap praktik penjualan makan ringan tanpa kemasan bersegel. Selain itu obyek penelitian skripsi juga berbeda dengan relevansi diatas, skripsi ini berfokus di Toko Damarian Bandar Lampung, dalam pelaksanaannya memiliki banyak perbedaan dengan relevansi diatas tersebut.

Berdasarkan pemaparan diatas, maka dapat diketahui bahwa judul skripsi yang diajukan oleh penulis memiliki substansi yang berbeda dengan karya-karya ilmiah yang telah ada. Oleh karena itu Praktik Penjualan Makan Ringan Tanpa Kemasan bersegel Ditinjau Dari Hukum perlindungan konsumen dan Hukum Islam sangat menarik dan layak untuk di teliti.

⁸¹ Eka Fasya Agustina, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Produk Olahan Kemasan Yang Tidak Mencantumkan Komposisi Bahan (Studi di Pasar Sayung)." (Skripsi Program Sarjana Hukum Islam di Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2013)

DAFTAR PUSTAKA

Abul Futuh habiri, *Sukses Bisnis Berkat Wasiat Nabi*, Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2007.

Adrian Sutedi, *Tanggung Jawab Produk Dalam Perlindungan Konsumen*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2008.

Ahmadi Miru, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.

Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Ahmad Mustaq, *Etika Bisnis Dalam Islam*, Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2003.

Amirudin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode dan Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.

Ana Rokhmatusa'dyah, *Hukum Investasi dan Pasar Modal*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Celina Tri Siwi Kristianti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Dedi Apriyanto, wawancara dengan penulis, Bandar Lampung, 1 Juli 2020.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.

Fitrotin Jamilah, *Strategi Penyelesaian Sengketa Bisnis*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2014.

Heri Andrian, wawancara dengan penulis, Bandar Lampung, 1 Juli 2020.

Ika Yunia Fauzia, *Etika Bisnis Dalam Islam*, Jakarta: Kencana, 2013.

Ikhwan Hamdani, *Sistem Pasar, Pengawasan Ekonomi (Hisbah) Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, Jakarta: Nur Ihsani, 2003.

Jusmaliani, *Bisnis Berbasis Syariah*, Jakarta: Bumi Aksara, 2008.

Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1986.

Karen Amstrong, *Muhammad Prophet For Our Time*, Bandung: Mizan, 2007.

Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Bandung: Mundur Maju, 1996.

Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana, 2012.

Moh Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis*, Jakarta: Bumi Aksara, 2006.

Muhammad Akram Khan, *Ajaran Nabi Muhammad SAW Tentang Ekonomi*, Jakarta: Bank Muamalat, 1996.

Muhammad Husain Haekal, *Sejarah Hidup Muhammad*, Jakarta: Tintamas, 1984.

Muhammad Syah, *Filsaat Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1999.

Nilam Apritia, wawancara dengan penulis, Bandar Lampung, 1 Juli 2020.

Runtung Sitepu, *Keberhasilan dan Kegagalan Penyelesaian Sengketa Alternatif*, Yogyakarta: Andi, 2002.

Sami bin Abdullah al-Maghlust, *Atlas Perjalanan Hidup Nabi Muhammad*, Jakarta: AlMahira, 2009

Sisi Susanti, wawancara dengan penulis, Bandar Lampung, 1 Juli 2020.

Suci Pratiwi, wawancara dengan penulis, 1 Juli 2020.

Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Bandung: Pustaka Setia, 2002.

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 1991.

Sulis S.R, wawancara dengan penulis, Bandar Lampung, 1 Juli 2020.

Susiadi, *Metodologi Penelitian Hukum*, Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbit LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2015.

Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Penerbit Andi, 2004.

Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh Terjemah Abdul Hayyie Al-Kattani*,
Jilid 5, Jakarta: Gema Insani, 2010.

Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*.

